

**Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif  
terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran  
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di Kabupaten Kampar)**

**OLEH:**

**JULIO HERDI PEURANDA**

**PEMBIMBING:**

**R. ADRI SATRIAWAN SURYA, SE,MA.,AK.,CA  
NURAZLINA, SE,M.SI,AK.,AAP.,CA**

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Email: julioherdipeuranda@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research is conducted to analyze the influence of effectiveness of budget control to echelon III and IV in SKPD Kampar regency. The research consists of a dependent variable that is effectiveness of budget control (Y) and two independent variables which preventive (X1) and detective control (X2).*

*The population in this research is all of echelon III and IV officials in SKPD Kampar regency with eightyeight respondents using purposive sampling technique. Data analysis using quantitative method with SPSS version seventeen.*

*The result of this research convey that all of the independent variables simultaneously affect the effectiveness of budget control significantly. At partially test only detective control has effect significantly while the others independent variables affect not significantly. Adjusted R square show at moderate level (fifty one point three percent). It means fourty eight point seven percent has affect by other variable beyond this research.*

*Keywords: Preventive and detective control, effectiveness of budget control*

## PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Tentu kinerja itu bisa dilihat dari setiap kegiatan organisasi yang telah dilaksanakan, kemudian setiap dari pelaksanaan itu harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi

Daerah yang terdiri dari UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001. Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat kepada DPRD). UU No. 32 mengalami perubahan menjadi UU.No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah secara tidak langsung telah mengantarkan prospek pada daerah untuk kearah yang lebih cerah, karena daerah diberi peluang sebesar-besarnya untuk mengatur rumah tangga daerahnya sesuai dengan potensi daerah bersangkutan. Didalam kinerja pengaturan tugas rumah tangga daerah terdapat anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan.

Pengelolaan pemerintah daerah dengan kinerja yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002a), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo (2002a),

anggaran berfungsi sebagai : (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) dan alat motivasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Kondisi ini mendorong organisasi publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan bertanggungjawab. Apabila dikelola secara baik dan bertanggungjawab, organisasi publik akan memberikan kontribusi pemasukan kepada kas daerah, yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang profesional sehingga mampu menciptakan suatu organisasi publik yang berorientasi pada value for money (effectivity, efficiency, economy) (Mardiasmo, 2004).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten maka pemerintah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat yang menjalankan dan yang mengawasi jalannya anggaran (PP Nomor 20 Tahun 2001).

Pengawas pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (Permendagri Nomor 71 tahun 2010).

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran semestinya di-realisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran.

Pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya (Porter, 1992 dalam Fajri, 2009). Jadi, pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118). Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi

mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektifitas pengendalian terhadap anggaran akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran.

Revrisond (2000: 118) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

Revrisond (2000: 123) menjelaskan bahwa pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. Revrisond (2000: 123) menjelaskan bahwa pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban benda-harawan. Pengawasan ini biasanya dilakukan setelah dilakukan tindakan/kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Selain itu pengawasan detektif juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan biayanya telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Porter (1992) dalam Fajri (2009) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif. Merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi.

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak optimal. Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan (Widjaja, 2002: 94).

Revrisond (2000: 123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000: 118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Pengawasan ini menurut teori dilakukan dengan memeriksa seluruh dokumen yang ada, dan tentu saja hal itu dilakukan setelah anggaran dipakai, dan digunakan, yang mana

pengawasan ini bertujuan memeriksa apakah penggunaan anggaran telah digunakan dengan efektif dan sesuai dengan ketetapan. Semakin bagus pengawasan detektif maka semakin baik pula pengendalian anggarannya. Jadi pengawasan detektif ber-pengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Porter (1992) dalam Fajri (2009) mengatakan pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi. Penganggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari standar dan berarti termasuk pengawasan preventif. Hindri (2006) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pe-nganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian yang me-liputi efektifitas pengendalian keuangan dan efektifitas pe-ngendalian kinerja pada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini men-dukung adanya hubungan kausalitas antara pengawasan preventif dengan efektifitas pengendalian keuangan daerah pada penelitian tersebut, yang menjadi objek penelitian adalah eselon dua sampai eselon tiga pada Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang diketahui, pejabat dinas pemerintahan daerah sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pelaksanaan anggaran pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pelaksana keuangan daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Sejumlah peneliti telah melakukan penelitian dengan topik ini. Diantaranya: Hindri Asmoko (2006), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian, yang memberikan hasil bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif signifikan terhadap efektifitas pengendalian keuangan dan kinerja.

Uci austin (2012), dengan penelitian berjudul Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan hasil penelitian bahwa seluruh variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Menghadapi akuntabilitas mengharuskan pemerintah memperhatikan beberapa hal antara lain; anggaran dan pengendalian akuntansinya. Tercapainya sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi akan menentukan kualitas atau kinerja dari pemerintah daerah.

Arif Fuadi (2013), dengan penelitian berjudul Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran pada SKPD kota Bukittinggi, yang mana memberikan hasil penelitian bahwa

pengawasan preventif dan pengawasan detektif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD di kota Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan Arif Fuadi (2013), dengan judul “Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD kota bukittinggi)”. Hasil penelitian arif fuadi menyatakan bahwa secara parsial variabel Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif berpengaruh signifikan terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. Berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini menambahkan satu variabel penganggaran berbasis kinerja yang diadopsi dari penelitian Hindri Asmoko (2006). Diharapkan hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran anggaran, pengendalian dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Kondisi tersebut yang mungkin terjadi di Kabupaten Kampar, dimana adanya pergantian kepala daerah pada Kabupaten tersebut.

Tingkat realisasi anggaran dari setiap SKPD dinilai masih banyak yang tidak mencapai target. Data tingkat pencapaian realisasi anggaran dapat kita peroleh dari informasi yang dipublikasikan pada media masa. Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 kabupaten Kampar tingkat realisasi anggaran rata-rata SKPD yang ada di

kabupaten Kampar berkisar pada 80%. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif ataupun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2011. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. Selain LHP atas LKPD TA 2011, BPK juga menyerahkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) per 31 Desember 2011.

Tahun 2011, BPK RI Menemukan permasalahan terkait kelemahan *Sistem Pengendalian Intern*, antara lain (1) Pengelolaan barang persediaan pada SKPD – SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar belum sesuai ketentuan; (2) Penyajian Aset tetap pada neraca per 31 Desember 2011 belum dicatat berdasarkan Konsep Nilai Perolehan; (3) Dana pengembangan Koperasi Unggulan belum jelas statusnya dan belum disetor ke Kas Daerah.

Permasalahan lain terkait *ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan*, antara lain (1) Sisa uang persediaan TA 2011 terlambat disetorkan ke Kas Daerah, Selain itu masih ada sisa uang persediaan TA 2009 yang belum disetorkan ke Kas Daerah, (2) Pada paket pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakit terdapat kelebihan pembayaran, (3) Pengelolaan penyer-taan modal pada koperasi belum tertib dan pengembalian penyertaan

modal belum disetorkan ke Kas Daerah.

Harapan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2011 tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada BPK RI. Selain itu Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pada hasil audit BPK tahun 2012 lalu Pemerintah Kabupaten Kampar meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu pada tahun Pemerintah Kabupaten Kampar berharap agar posisi ini lebih baik dan meningkat ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tentu merupakan tugas berat bagi Pemerintah Kabupaten Kampar namun yang terpenting adalah komitmen untuk meraih WTP tersebut, hal ini mengingat untuk mencapai tersebut perlu kerja berat dan terlebih lagi harus taat dan tertib mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pelaporan ([www.riau.go.id](http://www.riau.go.id)). Dilihat dari temuan yang ada, maka diperlukannya peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam setiap penyaluran kegiatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan fokus instansi pemerintah daerah yang berbeda yaitu pemerintah Kabupaten Kampar yaitu ditujukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Hal ini peneliti ingin mengetahui tingkat Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran di kabupaten kampar. Maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar)”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD Kabupaten Kampar??
2. Apakah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD Kabupaten Kampar??

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Kampar.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Kampar.

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran di SKPD kabupaten Kampar.
2. Bagi SKPD dapat menjadi masukan dalam efektifitas pengendalian anggaran organisasi dengan memperhatikan pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif.
3. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian dibidang akuntansi sektor publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori

#### Efektivitas Pengendalian Anggaran

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000:118).

Munandar (2001:1) mengatakan yang dimaksud anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan

datang. Indra (2006:164) diketahui bahwa anggaran juga memiliki fungsi sebagai:

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja.
- e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi.
- f. Anggaran merupakan instrumen politik.
- g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Indra (2006:180) mengatakan faktor penentu efektifitas suatu anggaran dilihat dari segi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran
- b. Fleksibilitas dalam fiskal
- c. Tingkat pengeluaran yang diharapkan
- d. Fasilitas dalam pemberlakuan tingkat pajak
- e. Batasan proses anggaran
- f. Waktu dan informasi
- g. Manajemen keuangan
- h. Waktu yang salah dalam melepaskan dana
- i. Biaya yang terlalu besar
- j. Kurangnya fleksibilitas dalam menggunakan dana

- k. Hambatan sumber daya manusia.

Efektivitas pengendalian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendalian (Kenis, 1979 dalam Mardiasmo, 2004). Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

### **Pengawasan Preventif**

Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Menurut Sopanah (2003) pengawasan dapat dilakukan berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Menurut Refrisond (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Widjaja (2002: 95) mengatakan pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan.

Menurut Refrisond (2000:123), tujuan pengawasan preventif secara terinci adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- b. Memberi pedoman bagi terseenggaranya pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.
- c. Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Tujuan pengawasan preventif terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan anggaran.

### **Pengawasan Detektif**

Porter (1992:177) mengatakan bahwa pengawasan detektif menyiagakan individu yang terlibat dalam suatu proses sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan. Menurut Revrisond (2000:123), pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dibedakan atas dua bagian, yaitu: pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat.

## Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Hubungan antara Pengawasan Preventif dan Efektifitas Pengendalian Anggaran

Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Dari penjelasan di atas maka hubungan antara pengawasan preventif dengan efektifitas anggaran saling mengikat, pengawasan detektif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut, jadi pengawasan preventif berpengaruh positif terhadap pengendalian anggaran.

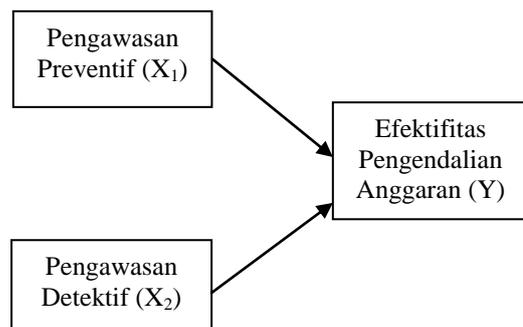
### 2. Hubungan antara Pengawasan Detektif dan Efektifitas Pengendalian

Revrisond (2000:118) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

Revrisond (2000:123) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000:118) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

#### Model Penelitian

Pengaruh antara pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut:



## Gambar 2.1 Model Penelitian

### Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pengawasan preventif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

H<sub>2</sub> : Pengawasan detektif berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

### METODOLOGI PENELITIAN

#### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah kabupaten Kampar, provinsi Riau. Kuesioner penelitian ini disebar ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kampar. Untuk kuesioner penelitian ini direncanakan dibagikan kepada responden, diisi oleh responden dan dikembalikan pada penulis dalam waktu sebulan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Cara ini dirasa paling efektif untuk mendapatkan data penelitian dengan pertimbangan efisien waktu, biaya dan keaslian data.

#### Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kampar, Provinsi Riau. Instansi wajib LAKIP yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dipilihlah 35 SKPD untuk dijadikan sampel. Sampel penelitian ini adalah pejabat dari golongan eselon III dan eselon IV yang bertugas di Instansi Pemerintah daerah yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang berjumlah **762** orang. Sampel tersebut dipilih dikarenakan pejabat eselon III dan eselon IV bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari anggaran yang telah disusun serta bertanggung jawab terhadap efektivitas pengendalian anggaran, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berikut ini adalah data mengenai jumlah pejabat eselon III dan eselon IV yang akan menjadi responden dalam penelitian ini. Ini dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

Dari data yang ada jumlah pejabat Eselon III dan Eselon IV menjadi populasi dalam penelitian ini. Untuk menentukan sampel minimum yang akan diambil dari populasi persamaan *slovin* (Husein Umar, 2000: 108). sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Nxe^2)}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = nilai toleransi sebesar 10% atau (0,1)

Dari 726 populasi dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengambil sampel minimal sebagai berikut:

$$n = \frac{726}{1 + (726 \times 0,1)^2} = 87.893462 = 88$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka diperoleh jumlah sampel minimal adalah sebanyak 88

orang. Untuk menghindari keterbatasan akan adanya kuesioner yang tidak kembali atau tidak bisa diolah maka peneliti mengantisipasi dengan mengambil kuesioner diatas jumlah sampel minimal.

Dalam hal ini peneliti mengirim masing-masing SKPD sebanyak 5 kuesioner, sehingga total kuesioner yang dikirim adalah:  $5 \times 35 = 175$  kuesioner.

## **Jenis dan Sumber Data**

### **Jenis Data**

Data pada penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi data subjek, data fisik dan data dokumenter. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data fisik adalah jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik antara lain dalam bentuk bangunan, pakaian, buku dan senjata. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 2002). Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data subjek. Dalam penelitian ini dasar subjek tersebut diarahkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kampar.

### **Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

(tidak melalui media perantara). Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kampar. Sumber data penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memenuhi kriteria menjadi obyek penelitian.

## **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

### **1. Pengawasan Preventif**

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam kegiatan pemerintahan terdapat dalam peraturan pemerintahan tentang sistem pengendalian internal. Pengawasan preventif dilakukan oleh atasan pada SKPD, yaitu kepala kantor dan kepala dinas.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah pengukuran sikap dengan menyatakan setuju atau tidaksetujuannya terhadap subjek, objek atau kejadian tertentu (Supomo dan Indrianto, 2002). Skor yang digunakan yaitu 1 s/d 5 yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

## 2. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi, serta untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor 1 s/d 5 yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

## 3. Efektifitas Pengendalian Anggaran

Efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, pengendalian anggaran yang efektif adalah yang dapat mencapai tujuan dari pengendalian anggaran tersebut. Pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor 1 s/d 5 yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, di mana penyebarannya dilakukan secara langsung dengan mendatangi secara langsung tiap-tiap responden. Jangka waktu yang diberikan kepada responden untuk pengembalian kuesioner selama 2 minggu.

Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah sebanyak 175 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 100 kuesioner (57,14%), dan sebanyak 75 kuesioner (42,86%) tidak mendapat respon dan atau tidak dikembalikan. Dari kuesioner yang kembali, sebanyak 12 kuesioner (6,86%) tidak dapat dianalisis, dan yang dapat dianalisis sebanyak 88 kuesioner (50,29%). Untuk melihat lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 : Tingkat Pengembalian dan Kelayakan Pengolahan Kuesioner**

Keterangan	Jumlah (Responden)
Kuesioner yang dibagikan	175
Kuesioner yang dikembalikan	100
Kuesioner yang tidak dikembalikan	75
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	12
Kuesioner yang dapat dianalisis	88

Sumber : Data Hasil Olahan, 2014

Dari tabel 4.1 di atas diketahui bahwa jumlah data yang bisa diolah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 data dan sudah memenuhi jumlah sampel minimum dan data yang bisa mewakili populasi yang diteliti.

## Metode Analisis Data

### Uji Kualitas data

#### Uji Validitas

Pengolahan uji data validitas ini menggunakan SPSS (*Services For Product and Statistic Solution*). Uji validitas dikatakan valid jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka item-item pernyataan dinyatakan valid, sedangkan jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item-item pernyataan dinyatakan tidak valid. Nilai  $r_{hitung}$  diambil dari output SPSS *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation*. Sedangkan nilai  $r_{tabel}$  diambil dengan menggunakan rumus  $df = n - 2$  (Ghozali, 2006). Yaitu  $df = 400 - 2 = 398$ , sehingga menghasilkan nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,197.

Dari Hasil penelitian ini dilihat bahwa nilai  $r_{hitung}$  berkisar antara 0,264 sampai 0,791. Jadi dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai  $r_{hitung} \geq$  dari nilai  $r_{tabel}$  (0,210) maka dapat disimpulkan seluruh item dari ketiga variabel dinyatakan valid.

#### Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item/pernyataan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan formula *cronbach's alpha* (koefisien alpha croncbach), dimana secara umum yang dianggap handal apabila nilai alpha croncbachnya  $> 0,6$  (Ghozali, 2006). Hasil lengkap uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengawasan Preventif	0.745	Reliabel
Pengawasan Detektif	0.830	Reliabel
Efektifitas Pengendalian Anggaran	0.709	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui hasil pengujian nilai reliabilitas ketiga variabel berada di atas angka 0,6. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

#### Uji Regresi Linear Berganda

Analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan analisa kuantitatif yaitu dengan suatu model untuk mengukur pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Dari hasil tanggapan responden kemudian didistribusikan ke dalam program SPSS *versi 17*. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut dilakukan analisis regresi linear berganda. Hasil regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 4.11**

Berdasarkan Tabel 4.11 didapat persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,781 + 0,232 X_1 + 0,585 X_2 + e$$

Variabel Pengawasan Detektif ( $X_2$ ) merupakan variabel dominan yang mempengaruhi Efektifitas Pengendalian Anggaran Pegawai Negeri Sipil di SKPD Kabupaten Kampar sebesar 0,585.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Pada penelitian ini, pengujian normalitasnya dapat dilihat dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov yaitu dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05

berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Lebih lanjut, jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, berarti data yang kita uji normal, tidak berbeda dengan normal baku.

Uji normalitas Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari **Tabel 4.12**.

Dari Tabel 4.12 dapat dilihat nilai dari Asymp. Sig. Variabel Pengawasan Preventif (X1) adalah 0,097, Variabel Pengawasan Detektif (X2) adalah 0,126 dan Variabel Efektifitas Pengendalian Anggaran (Y) adalah 0,328. Nilai dari variabel-variabel tersebut > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan data dapat dilanjutkan pengolahannya.

#### Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan nilai *tolerance* berkisar angka 5. Bila *tolerance* kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila  $VIF > 10$ , berarti variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel independen lainnya. Sebaliknya jika  $VIF < 10$  maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antar satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam persamaan regresi. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari Tabel 4.13 berikut ini:

**Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengawasan Preventif	.642	1.558
	Pengawasan Detektif	.642	1.558

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran

*Sumber:* Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014

Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari **Tabel 4.14**.

Dari Tabel 4.14 dapat dilihat nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* sebesar 0,880 dan 0,633. Karena nilai signifikan antara variabel independen dan *absolute residual* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

#### Hasil Pengujian Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW). Jika angka DW dibawah -2, maka terdapat autokorelasi positif. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, maka tidak terdapat autokorelasi. Jika angka DW diatas +2, maka

terdapat autokorelasi negatif. Uji autokorelasi dapat dilihat dari Tabel 4.15 berikut ini:

**Tabel 4.15 Hasil Pengujian Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 <sup>a</sup>	.524	.513	.24709	1.952

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Detektif, Pengawasan Preventif

b. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran

*Sumber:* Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui nilai  $d_{hitung}$  (Durbin Watson) adalah 1,952 yang terletak antara -2 dan +2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

### Hasil Pengujian dan Pembahasan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis H1 dan H2 dengan bantuan *software statistical product and service solution* (SPSS). Hasil pengujian hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 4.16**.

Dari Tabel 4.16 diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan Persamaan berikut:

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\ &= 88 - 2 - 1 : 0,05 / 2 \\ &= 85 : 0,025 \\ &= 1,988 \end{aligned}$$

keterangan: n : jumlah  
k : jumlah variabel bebas  
1 : konstan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang ditampilkan pada Tabel 4.16 diperoleh nilai t

hitung pada penelitian ini sebesar 1,685 dan t tabel sebesar 1,988, dengan signifikansi 0,096. Karena t hitung < t tabel (1,685 < 1,988) dan nilai sig > 0,05 (0,096 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak artinya tidak terdapat pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Tidak berpengaruhnya pengawasan preventif secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran karena dinilai kurang efektifnya sistem pengawasan ini dilakukan. Walaupun pengawasan preventif memiliki kelebihan dimana manajemen dapat membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan, biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya cukup mahal. Banyak kegiatan yang tidak memungkinkan dimonitor secara terus-menerus, dan pengawasan yang berlebihan cenderung membuat produktivitas akan menurun. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arif Fuadi (2013).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yang ditampilkan pada Tabel 4.16 diperoleh nilai t hitung pada penelitian ini sebesar 6,626 dan t tabel sebesar 1,988, dengan signifikansi 0,000. Karena t hitung > t tabel (6,626 > 1,988) dan nilai sig > 0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima artinya terdapat pengaruh pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa semakin ditingkatkan pengawasan detektif maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran. Sebaliknya, semakin dikurangi pengawasan

detektif maka akan menurunkan efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Fuadi (2013). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Pengawasan detektif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban Bendaharawan. Dengan kegiatan yang telah diselesaikan maka dapat diketahui bagian-bagian atau proses-proses yang tidak terjadi semestinya.

### Hasil Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)

Pengujian hipotesis secara simultan (keseluruhan) menunjukkan pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat dilihat pada **Tabel 4.17**

Dari Tabel 4.17 diketahui F hitung sebesar 46,845 dengan signifikansi 0,000. F tabel dapat diperoleh sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = n - k - 1 ; k$$

$$F \text{ tabel} = 88 - 2 - 1 ; 2$$

$$F \text{ tabel} = 85 ; 2$$

$$F \text{ tabel} = 3,104$$

Keterangan n : jumlah sampel  
k : jumlah variabel bebas  
1 : konstan

Dengan demikian diketahui F hitung  $46,845 > F \text{ tabel } 3,104$  dengan Sig.  $0,000 < 0,05$ . Artinya adalah

bahwa pengawasan preventif dan pengawasan detektif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 <sup>a</sup>	.524	.513	.24709

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Detektif, Pengawasan Preventif

b. Dependent Variable: Efektivitas Pengendalian Anggaran

Sumber: Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014

Dari Tabel 4.18 diketahui nilai R Square sebesar 0,513. Artinya adalah bahwa pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran adalah sebesar 51,3 %. Sedangkan sisanya 48,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Setelah menganalisis pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Arif Fuadi (2013).
  2. Pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar, hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuadi (2013).
- efektivitas pengendalian anggaran sudah tergolong baik.
  2. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengawasan detektif mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar. Untuk itu diharapkan kepada SKPD agar senantiasa melakukan pengawasan detektif pada SKPD Kabupaten Kampar.
  3. Koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,513 artinya adalah bahwa pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran adalah sebesar 51,3 %. Sedangkan sisanya 48,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengendalian anggaran dengan studi empiris pada SKPD Kabupaten Kampar berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

### **Keterbatasan**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mendampingi responden pada saat menjawab kuesioner. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya atau yang dibutuhkan oleh peneliti.

### **Implikasi dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pejabat eselon III dan eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar untuk dapat mempertahankan efektivitas pengendalian anggarannya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arens & Loebbecke. (2008). *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hindri Asmoko (2006). "Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian". Melalui (<http://www.bppk.depkeu.go.id>). [1 Desember 2008].

- Husein Umar. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Ketetapan MPR RI Nomor II Tahun 1988 tentang GBHN
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152 tahun 2011 Tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan
- Mardiasmo.(2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widjaja. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## LAMPIRAN

**Tabel 3.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar**

No	Instansi / Unit Kerja	Jumlah Pejabat Eselon III dan Eselon IV
1	Sekretariat Daerah	44
2	Inspektorat Kabupaten Kampar	20
3	Sekretariat DPRD	17
4	Badan pemberdayaan daerah	19
5	Badan Kepegawaian Daerah	19
6	BPPM	12
7	BALITBANG	20
8	BKBPPM	17
9	Badan Lingkungan Hidup	13
10	BPPKB	16
11	BPPKP	15
12	Badan Penanggulangan Bencana	17
13	Dinas Perkebunan	16
14	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	18
15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	45
16	Dinas Kesehatan	44
17	Dinas Bina Marga dan Pengairan	20
18	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	16
19	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	19
20	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	14
21	Dinas Perikanan	25
22	Dinas Peternakan	24
23	Dinas Pertambangan dan Energi	15
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	12
25	Dinas Koperasi dan UKM	15
26	Dinas Kehutanan	41
27	Dinas Pendapatan Daerah	19
28	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	40
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	26
31	Kantor Pelayanan Terpadu	11
32	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	12
33	Kantor Perpustakaan dan Arsip	7
34	Kantor PDED	21
35	RSUD Bangkinang	17
	JUMLAH	726

Sumber: Kantor BAPPEDA Kabupaten Kampar

**Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.781	.450		1.736	.086
	Pengawasan Preventif	.232	.137	.157	1.685	.096
	Pengawasan Detektif	.585	.088	.619	6.626	.000

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran

*Sumber* : Data Olahan Hasil Penelitian**Tabel 4.12 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Pengawasan Preventif	Pengawasan Detektif	Efektifitas Pengendalian Anggaran
	N	88	88	88
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	4.0557	4.3216	4.2497
	Std. Deviation	.24075	.37428	.35412
Most Extreme Differences	Absolute	.131	.125	.101
	Positive	.131	.123	.099
	Negative	-.101	-.125	-.101
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.230	1.176	.950
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.097	.126	.328

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

*Sumber*: Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014**Tabel 4.14 Uji Heteroskedastisitas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.255	.264		.963	.338
	Pengawasan Preventif	.012	.081	.020	.151	.880
	Pengawasan Detektif	-.025	.052	-.065	-.480	.633

a. Dependent Variable: Abs\_Res

*Sumber*: Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014

**Tabel 4.16 Uji Hipotesis Pertama dan Kedua****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.781	.450		1.736	.086
	Pengawasan Preventif	.232	.137	.157	1.685	.096
	Pengawasan Detektif	.585	.088	.619	6.626	.000

a. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran

*Sumber:* Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014**Tabel 4.17 Hasil Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Simultan)****ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.720	2	2.860	46.845	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.190	85	.061		
	Total	10.910	87			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Detektif, Pengawasan Preventif

b. Dependent Variable: Efektifitas Pengendalian Anggaran

*Sumber:* Data Olahan SPSS Hasil Penelitian Tahun 2014